



## Amankan Penambangan Ilegal Puluhan Tahun

# Tersangka Ungkap Setoran ke Oknum di Pemkab

Gianyar (Bali Post) -

Kasus penambangan liar batu padas di Gianyar ternyata sudah berlangsung puluhan tahun. Yang mengejutkan, untuk mengamankan kegiatan ilegal ini para penambang rutin menyetor iuran bulanan kepada oknum tertentu yang berkedok sebagai penegak Perda Kabupaten Gianyar. Informasi ini diperoleh polisi dari tersangka I Made Mudiarta (39). Kini, Sat. Reskrim Polres Gianyar memfokuskan perhatiannya terhadap hal ini.

"Setelah polisi mendalami keterangan tersangka, dia mengaku bahwa selama ini ada uang pungutan atau setoran ke sejumlah instansi di pemerintahan khususnya Pemkab Gianyar, untuk kelancaran aksi penambangan batu padas ilegal ini," ujar Kapolres Gianyar AKBP Farman saat ditemui, Selasa (27/10) kemarin.

Sementara Kanit IV Sateskrim Polres Gianyar Ipda A.A. Gede Alit Sudarma yang

ditemui di ruangannya menjelaskan, hasil penyidikan terhadap tersangka I Made Mudiarta (39) bahwa para penambang liar ini memiliki perhimpunan pemilik tambang. "Tersangka ini juga salah satu dari 40 orang anggota perhimpunan pemilik tambang. Mereka sudah sejak lama menggalai batu padas di seputaran Tukad Petanu, Tegenungan, Semampang, Glogor, hingga di seputaran Loddunduh, Ubud,"

terangnya.

Dikatakannya, ke-40 pemilik tambang ini dikuasai oleh I Nyoman P. Kepada I Nyoman P inilah setiap bulan mereka secara rutin menyerahkan uang setoran masing-masing sejumlah Rp 100 ribu, kadang juga bervariasi sampai Rp 300 ribu. "Uang setoran itu selanjutnya mengalir ke sejumlah oknum di instansi pemerintahan dari tingkat bawah hingga atas. Dari pengakuan tersangka, uang setoran itu juga digunakan untuk upacara di salah satu pura hingga perbaikan jalan," ujarnya.

Selain iuran tersebut, ada juga oknum dan Pemkab Gianyar yang rutin menyelenggarakan sidak, antara tiga sampai empat kali dalam setahun untuk satu titik saja. "Pengakuan tersangka sidak ini tidak tentu, kadang bisa rutin setiap bulan, tapi yang pasti rutin setahun

dua kali, dan setelah sidak itu ada uang setoran sebagai bentuk mediasi," ungkapnya.

Dalam mediasi sidak tersebut, tersangka mengaku pernah menyerahkan setoran Rp 500 ribu dari satu orang pemilik tambang. Bila dikalikan 40 pemilik tambang, jumlah satu kali setoran tersebut diperkirakan mencapai Rp 20 juta. "Kalau sidak itu kan banyak alat penambang yang diambil sehingga harus dimediasi. Tersangka ini mengaku hanya sekali pernah menyerahkan uang setoran dengan jumlah Rp 500 ribu, namun uang dengan jumlah yang sama juga disetorkan oleh 40 anggota lainnya," ungkap Ipda A.A. Gede Alit Sudarma.

Apakah ada setoran rutin setiap bulan untuk oknum yang berkedok penegak Perda Kabupaten Gianyar itu?

"Tersangka belum berani memastikan hal itu, tapi dalam pemeriksaan ia juga sempat mengatakan kalau setoran langsung dari I Nyoman P. ke petugas itu mungkin saja," kata Ipda Agung menirukan pengakuan I Made Mudiarta.

Meski demikian, Ipda Agung menegaskan jajarannya masih akan mendalami kasus ini dari pengakuan tersangka tersebut. Selain itu, kini pihaknya menunggu waktu untuk melakukan penindakan terhadap sejumlah penambangan batu padas yang masih beroperasi. "Di Gianyar ini, ada banyak titik penambangan batu padas, bahkan ada yang dikelola oleh orang luar Gianyar. Selanjutnya itu akan kami sasar tapi kami prioritaskan tangkap tangan langsung, lalu diperiksa di Mapolres Gianyar," ujarnya. (kmb35)

Edisi : Rabu, 28 Oktober 2015

Hal : 9



Gedung Pavilion untuk Krama Berduit

Faskes RS Mangusada

Telan Anggaran

Rp 90 Miliar

Mangupura (Bali Post) -

Pengadaan barang-barang fasilitas kesehatan (faskes) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mangusada, Badung, cukup menyerap APBD Badung 2015. Bahkan, untuk memenuhi faskes di tiga gedung baru, yakni gedung B, C, dan E, pemerintah setempat menganggarkan hingga Rp 90 miliar. Anggaran tersebut di antaranya untuk menyediakan dua ruang operasi yang dilengkapi alat anastesi senilai Rp 2,3 miliar per unit, penyediaan ruang pemeriksaan MRI (*Magnetic Resonance Imaging*) untuk pemeriksaan radiologi yang menggunakan prinsip magnetisasi senilai Rp 17 miliar, dan Rp 3 miliar lebih untuk unit alat operasi jantung.

"Yang paling baru adalah alat anastesi. Alat ini hanya ada di sini dan Singapura. Di Indonesia hanya satu-satu-

nya di RS Magusada. Semua itu telah dianggarkan dalam APBD Induk dan Perubahan," ujar Dirut RSUD Mangusada

Badung dr. Agus Bintang Suryadi saat ditemui, Selasa (27/10) kemarin.

Dia menjelaskan, dengan

rampungnya gedung pavilion, otomatis ada tempat khusus bagi pelayanan *krama* Badung yang berduit. Pasalnya, gedung baru ini menyajikan kamar VIP, VVIP dan super VIP. Servis bagi masyarakat yang mampu ini juga luar biasa. Sebab, tidak perlu bolak-balik lagi ke gedung sebelah karena telah disediakan peralatan canggih, UGD dan pendukung lainnya di situ. "Jumlah pasien juga terus

meningkat. Di poliklinik saja mencapai 400-500 orang per hari, UGD mencapai 75-125 per hari, dan rawat inap rata-rata penuh. Bahkan, banyak pasien yang hanya mau dirawat di sini," ujarnya.

Pihaknya mengaku kini juga tidak "menelantarkan" pasien yang datang berobat ke RSUD Badung. "Kalau dulu kamar penuh, pasien kami suruh mencari rumah sakit lain. Tapi sekarang,

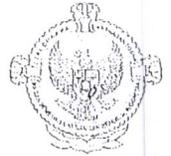
kami yang menghubungi rumah sakit-rumah sakit yang ada, kemudian dirujuk ke sana," terangnya.

Seiring meningkatnya jumlah kunjungan pasien, pihaknya akan berupaya terus meningkatkan faskes untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. "Dengan pertumbuhan pasien yang terus meningkat, kemungkinan diperlukan penambahan kamar," katanya.

Wakil Ketua II DPRD Badung Made Sunarta yang ditemui di lokasi juga akan mendukung semua program pengembangan di RSUD Mangusada. "RSUD Mangusada sekarang tidak hanya rumah sakit besar, tetapi sudah menjadi rumah sakit pilihan. Jadi, kami mendukung setiap pengembangan fasilitas kesehatan yang dilakukan," ungkapnya. (kmb27)

Edisi : Rabu, 28 Oktober 2015

Hal : 3



## Kisruh Mutasi dan Perwali

# Fraksi Demokrat Minta Pemkot

# Keluarkan IMB RS Indra

Denpasar (Bali Post) –

Kisruh mutasi dan Perwali yang dikeluarkan Penjabat (Pj.) Wali Kota Denpasar A.A. Gede Geriya, rupanya berlanjut. Munculnya pernyataan Fraksi PDI-P, mendapat tanggapan dari Fraksi Demokrat. Fraksi ini menyatakan tidak setuju ada status quo atas keputusan Pj. Wali Kota Denpasar terkait dengan mutasi dan perwali yang dikeluarkannya.

Ketua Fraksi Demokrat A.A. Susruta Ngurah Putra, Selasa (27/10) kemarin mengaku tidak setuju dengan pernyataan rekan-rekannya di fraksi terbesar di DPRD Denpasar itu. Pihaknya justru mendorong Pemkot Den-

pasar segera mengeluarkan kebijakan lanjutan, termasuk mengeluarkan IMB pengembangan RS Indra. "Terkait dengan pernyataan PDI-P, kami justru sebaliknya. Harus segera ditindaklanjuti, seperti mengeluar-

kan IMB RS Indra," kata politisi Partai Demokrat Denpasar ini.

Susruta menilai Perwali No. 14 Tahun 2014 lalu bertentangan dengan Perda No. 27 Tahun 2011 tentang RTRW. Karena, dalam RTRW itu pada pasal 53 ayat 2 telah disebutkan, fasilitas kesehatan yang perlu dikembangkan salah satunya yakni RS Indra. "Dalam Perda RTRW sudah jelas RS Indra itu masuk," katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Fraksi PDI-P DPRD Denpasar Wayan Suadi Putra, S.T. didampingi sejumlah anggotanya mengaku

telah mendengar akan ada desakan kepada pemerintah kota untuk mengeluarkan IMB terkait pengembangan RS Indra yang sebelumnya terhalang karena tidak sesuai dengan zonasi. Namun, pihaknya berharap semua pihak tetap menghormati apa yang menjadi petunjuk dari KASN terkait dengan kewenangan penjabat wali kota.

Hal yang sama ditegaskan anggota Fraksi PDI-P yang juga Ketua Komisi I Ketut Suteja Kumara dan Ketua Komisi II Eko Supriadi. Suteja Kumara berharap apa yang telah dike-



Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Hubungi telepon 085 100 400 391, (0361) 819446

luarkan Pj. Wali Kota Denpasar, baik itu Perwali atau kebijakan lainnya, agar distatusquokan. Artinya, jangan ada tindak lanjut dulu sebelum ada pejabat difinitif. "Ini terkait dengan surat penjelasan yang diterima DPRD dari KASN, yang mana masih perpedoman dengan PP 49 Tahun 2008," kata Suteja Kumara. (kmb12)

Edisi : Rabu, 28 Oktober 2015

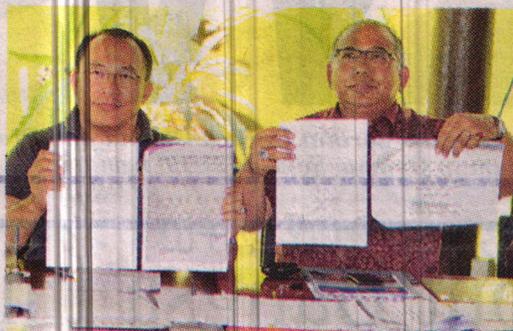
Hal : 2



## Terkait Reklamasi Teluk Benoa Surat FSM dan Parasparos Dipalsukan

Denpasar  
(Bali Post) -

Kekuatan kelompok-kelompok tertentu untuk menggolkan rencana reklamasi di Teluk Benoa, terus dilakukan. Sayangnya, cara yang dilakukannya terkadang menggunakan cara-cara yang tidak pantas. Seperti memalsukan nama dan lambang organisasi yang resmi. Buktinya, surat Forum Studi Majapahit (FSM) dan Parasparos sudah dipalsukan. Tujuannya



Bali Post/eka

**DIPALSUKAN - Ketua Forum Studi Majapahit, Made Suryawan dan A.A. Suryawan Wiranatha dari Parasparos, Selasa (27/10) kemarin menunjukkan kopian dokumen yang diduga dipalsukan.**

untuk menggolkan rencana besar dari investor.

Ketua Forum Studi Majapahit Ir. Made Suryawan, M.M., CHA. dan Ketua Parasparos Ir. Agung Suryawan Wiranatha, M.Sc., Ph.D. menyatakan keprihatinannya. Mereka mengaku resah dan gusar terkait adanya pemalsuan surat yang mengatasnamakan Forum Studi Majapahit dan Parasparos. "Kami sangat prihatin," ujar kedua tokoh yang *concern* menolak reklamasi ini, Selasa (27/10) kemarin.

Suryawan khawatir, kasus seperti ini bukan saja dialami organisasinya saja, bisa jadi organisasi lain bernasib sama. Karena itu, pihaknya hadir untuk menyatukan langkah, membuktikan soliditasnya, serta komitmennya tetap sama, yakni menolak reklamasi. "Kami merasa terusik dengan surat palsu yang mengatasnamakan organisasi kami," ujarnya dalam jumpa pers yang dihadiri para tokoh Bali lainnya, di antaranya Prof. Ketut Rahyuda (Forum Love Bali), I.B. Adnyana (Cakrawayu), Nyoman Mardika (ForBALI), Drs. A.A. Made Arwata, MSP., sejumlah aktivis dari KMHDI serta beberapa organisasi yang menolak reklamasi di Teluk Benoa.

Suryawan mengatakan, terbongkarnya dugaan pemalsuan surat ini, tidak terlepas dari informasi yang diterimanya dari rekan-rekannya yang sepaham di pusat. "Mereka sempat mempertanyakan komitmen kami terkait dengan reklamasi ini. Ini mungkin sudah kehendak alam, sehingga kami mengetahui ada dugaan pemalsuan ini. Sikap kami tetap konsisten menolak. Pemalsuan surat ini, kami seolah-olah mendukung. Ini merupakan kejahatan yang dilakukan kelompok tak punya jati diri, suka bohong, dan sebagainya," katanya.

Hal senada juga diungkapkan Agung Suryawan Wiranatha. Dikatakannya, sudah sempat bersurat kepada Presiden dan ditembuskan kepada instansi terkait lainnya pada 17 Maret 2015 lalu. Surat itu isinya menolak rencana reklamasi Teluk Benoa.

Terkait pemalsuan dukungan, ia menyebutkan surat mendukung reklamasi tersebut banyak yang janggal. Misalnya, tanda tangan dirinya tidak sama. Logo organisasi juga berbeda. Mereka menggunakan stempel yang berbeda. Surat yang palsu itu dikirim ke kementerian dan juga ditembuskan ke LAPOR (layanan aspirasi dan pengaduan *online* rakyat), per 7 September 2015 lalu. "Beruntung, pihak LAPOR melakukan klarifikasi ke *email* saya, sehingga kami tahu ada pemalsuan ini," ujarnya. (kmb12)

Edisi : Rabu, 28 Oktober 2015

Hal : 2